PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KOTA DAN KABUPATEN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Skripsi Oleh :

CHRISTYANI M NAIBAHO

01101003069

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

R: 25495/26086

S
352.2507
Hai
P
2014
G 14492.

PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KOTA DAN KABUPATEN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
ILMU ALAT PENGABDIAN

Skripsi Oleh :

CHRISTYANI M NAIBAHO

01101003069

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF

PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KOTA DAN KABUPATEN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun Oleh:

Nama	: Christyani M Naibaho
NIM	: 01101003069
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 04 Maret 2014 Ketua : Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak
NIP. 196508161995121001

Tanggal: 03 Maret 2014 Anggota : Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197802102001122001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KOTA DAN KABUPATEN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disususn oleh:

Nama	: Christyani M Naibaho
NIM	: 01101003069
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 18 Maret 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 18 Maret 2014

Ketua	Anggota	Anggota
Ahmad Subeki, S.E.,M.M.,Ak	Eka Meirawati, S.E., M.Si, Ak	Drs. Tanzil Djunaidi, Ak
NIP. 196508161995121001	NIP. 196905251996032001	NIP. 195207061978021002

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Ahmad Subeki, S.E.,M.M.,Ak

NIP. 196508161995121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Christyani M Naibaho

NIM : 01101003069

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Pengaruh Kemandirian Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan.

Pembimbing :

Ketua : Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak

Anggota : Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak

Tanggal Ujian : 18 Maret 2014

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 19 Maret 2014

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
45A54ACF211851056
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Christyani M Naibaho

NIM 01101003069

MOTTO

Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah – limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.

(Mazmur 16 : 11)

Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.

(Pengkhotbah 3 : 11)

Kupersembahkan kepada :

Tuhan Yesus Kristus

Papa dan mama yang tidak hentinya mendoakan dan mendukungku.

Adikku tersayang (Manalsal dan Yunnari).

Almamaterku Akuntansi 2010.

Sahabat-sahabatku.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul Pengaruh Kemandirian dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh dari kemandirian daerah yang dapat dilihat dari penerimaan dan penggunaan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pemenuhan belanja Pemerintah daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak selaku dosen pembimbing I dan Ibu Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama pelaksanaan tugas akhir dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Sekretaris Jurusan Akuntansi.

4. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
5. Seluruh staf dosen Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.
6. Orang tua saya terkasih Ayahnda A. Naibaho dan Ibunda R. Pinem yang atas segala doa, kasih sayang, dukungan moril dan material kepada penulis agar tetap termotivasi dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
7. Keluarga besar Naibaho dan Pinem terkhusus untuk kakek yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada saya selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara – saudariku Yunnari Naibaho dan Manalsal Naibaho untuk setiap dukungannya.
9. Teman – teman pengurus PO Neraca Kasih Nesti, Fian, Dewi, Ruth, Nova, Yandhika, Serly, Besmeli, Debora, Ray, Lola, Rina, Friska, Fera untuk setiap kebersamaan dan pelayanannya di Po Neraca Kasih.
10. Teman – teman angkatan 2010 khususnya Apri, Eva, Wiwin, Nelsi, Rena, Zatin, Andre dan sahabatku Yuswarni Sidabalok untuk setiap kebersamaan dari awal masuk sebagai mahasiswa di Universitas Sriwijaya.
11. Kakak dan abang tingkat Kak Frisca, Kak Rosa, Kak Jelita, Kak Tri Utami, Kak Maya, Bang Epril, Bang Lundu untuk kebersamaannya selama menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, 6 Maret 2014

Penulis

ABSTRAK

PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KOTA DAN KABUPATEN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

Christyani M Naibaho

Kemandirian daerah dan dana perimbangan merupakan faktor yang dapat menetukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksankan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari kemandirian daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil terhadap belanja daerah dan melihat potensi dari pendapatan asli daerah untuk mencapai kemandirian daerah agar daerah pemerintahan tersebut dapat memaksimalkan pendapatan daerahnya untuk mencapai kemandirian daerah.

Penelitian ini menggunakan sebanyak 15 sampel daerah Sumatera Selatan yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran dari Tahun 2008 hingga 2011. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu: kemandirian daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Variabel terikat dari penelitian ini yaitu belanja daerah. Metode analisisnya menggunakan analisis linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Pada dana perimbangan, dana alokasi umum dan dana bagi hasil memliki pengaruh positif dan sedangkan dana alokasi khusus memiliki pengaruh negatif terhadap belanja daerah. Secara simultan kemandirian daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat memliki keterkaitan erat dengan belanja daerah Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : *Kemandirian Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah*

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF SOUTH SUMATERA PROVINCE'S CITY AND COUNTY GOVERMENT'S SELF SUFFICIENCY AND SUPPORT FUNDS ON THEIR EXPENDITURES

Oleh:

Christyani M Naibaho; Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak,

Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si.,Ak

Self sufficiency and support funds of a regional goverment constitute its capability to undertake its autonomous governance. This research was an attempt to identify the influence of the city and county governments' self sufficiency, general expense allotment, special expense allotment, support funding on their potential revenues so that each government can function autonomously.

This research used 15 samples in South Sumatera. The financial reports of expenditures by the 15 local governments in the period of 2008-2011 were analyzed. The analysis dealt with self sufficiency, general expense allotment, special expence allotment, and support funding. The dependent variable was the expenditures. The multiple linier regression analysis was undertaken to compute the data.

The research result show that in partial self suddiciency of each goverment had a positive influence on the regional expenditures. In the balance fund, general expense allotment and support funding had a positive influence, whereas special expense allotment had negative influence. The self sufficiency, general expense allotment, special expense allotment, and support funding simultanerously had positive and significant influence on the expenditures. Transferred funds from the central government was correlated with the local goverments' expenditures.

Key words: self sufficiency, general expense allotment, special expense allotment, support funding expenditures

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
LEMBAGA BAHASA

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa	**: Christyani M Naibaho**
Jenis Kelamin	**: Perempuan**
Tempat/Tanggal Lahir	**: Pematangsiantar / 03 Agustus 1991**
Agama	**: Kristen Protestan**
Status	**: Mahasiswa**
Alamat Rumah (Orangtua)	**: Jalan Melanthon Siregar Gg. Sipahutar Ujung, Pematangsiantar Sumatera Utara**
Alamat Email	**: christyani.naibaho@yahoo.com**
Pendidikan Formal:	
Sekolah Dasar	**: SD Cinta Rakyat 2 Pematangsiantar**
SMP	**: SMP Budi Mulia Pematangsiantar**
SMA	**: SMA Budi Mulia Pematangsiantar**
Pendidikan Non Formal Terpadu	**: Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B**
Pengalaman Organisasi	**: 1. Sekretaris Bendahara Persekutuan Oikumene Neraca Kasih (2012-sekarang)**
	2. Anggota Divisi Kerohanian Ikatan Mahasiswa Akuntansi (2011-2012)
	3. Anggota Muda Ikatan Akuntan Indonesia

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 141192
TANGGAL : 11 APR 2014

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSEMBAHAN i

KATA PENGANTAR ii

ABSTRAK (BAHASA INDONESIA DAN INGGRIS) iv

RIWAYAT HIDUP v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Manfaat Penelitian 7
1.5. Sistematika Pembahasan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

2.1. Landasan Teori 9
2.1.1. Teori Keagenan 9
2.1.2. Konsep Desentralisasi Fiskal 10
2.1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 11
2.1.4. Otonomi Daerah 11
2.1.5. Kemandirian Daerah 12
2.1.6. Pendapatan Asli Daerah 12
2.1.7. Dana Perimbangan 15
2.1.7.1. Dana Alokasi Umum 15
2.1.7.2. Dana Alokasi Khusus 16
2.1.7.3. Dana Bagi Hasil 17
2.1.8. Transfer 17
2.1.9. Belanja Daerah 18
2.2. Penelitian Terdahulu 19
2.3. Kerangka Pemikiran 24

2.4. Hipotesis 25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 28

3.1. Populasi dan Sampel 28
3.2. Teknik Pengumpulan Data 28
3.3. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 29
3.3.1. Variabel Penelitian 29
3.3.1.1. Variabel Independen 29
3.3.1.2. Variabel Dependen 29
3.3.2. Defenisi Operasional 29
3.4. Teknik Analisis 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39

4.1. Hasil Penelitian 39
4.2. Pembahasan 51

BAB V KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN, IMPLIKASI .63

5.1. Kesimpulan 63
5.2. Saran 64
5.3. Keterbatasan 65
5.4. Implikasi 65

Daftar Pustaka 67

Lampiran – Lampiran 69

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 23

Tabel 3.1. Defenisi Operasional 30

Tabel 3.2. Tabel Pengambil Keputusan Ada Tidaknya Autokolerasi 34

Tabel 4.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan 40

Tabel 4.2. Hasil Uji Multikolinearitas Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan 45

Tabel 4.3. Hasil Uji Autokolerasi Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan 46

Tabel 4.4. Hasil Regresi Berganda 48

Tabel 4.5. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 49

Tabel 4.6. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 49

Tabel 4.7. Uji Koefisien Determinasi (R^2) 51

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Model Kerangka Konseptual 25

Gambar 4.1. Histogram Uji Normalitas 43

Gambar 4.2. Hasil Normal P-P Plot Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2011 44

Gambar 4.3. Hasil Uji Heterokedastisitas Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2011 47

Gambar 4.4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten Sumatera Selatan Tahun 2008-2011 52

Gambar 4.5. Dana Alokasi Umum Kota dan Kabupaten Sumatera Selatan Tahun 2008-2011 53

Gambar 4.6. Dana Alokasi Khusus Kota dan Kabupaten Sumatera Selatan Tahun 2008-2011 54

Gambar 4.7. Dana Bagi Hasil Kota dan Kabupaten Sumatera Selatan Tahun 2008-2011 55

Gambar 4.8. Belanja Daerah Kota dan Kabupaten Sumatera Selatan Tahun 2008-2011 56

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota
Seluruh Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Penerimaan 70

Data Untuk SPSS 79

Tabel dan Gambar Hasil Uji Statistik dengan
Menggunakan SPSS 16 83

Gambar Grafik Kondisi Keuangan Kota dan Kabupaten
Seluruh Provinsi Sumatera Selatan 86

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah berlangsung lama bahkan sebelum kemerdekaan, dan mencapai puncaknya pada era reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimabangan Keuangan yang kemudian direvisi masing-masing menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004. Kebijakan Pemerintah tentang otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Melalui otonomi daerah setiap Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang dan kekuasaan untuk mengatur keuangan daerah tersebut. Otonomi daerah memilki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat, daerah dan antar daerah.

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mendekatkan hubungan pemerintah dengan rakyat, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan pembangunan dan sistem pembiayaan diatur sesuai dengan

potensi dan kapasitas suatu daerah dalam menjalankannya dapat dilihat dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Pendelegasian fiskal ini mengatur wewenang pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak daerah dan retribusi daearah merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi sumber utama penerimaan daerah dalam mejalankan roda pemerintahan daerah tersebut terutama dalam bidang keuangan daerah dan pengembangan pembnagunan daerah. Meskipun pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber utama penerimaan daerah namun pada kenyataannya Pemerintah Daerah masih membutuhkan dana transfer dari Pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan daerah tersebut yang berasal dari dana perimbangan terdapat pada APBN ditetapkan setiap tahunnya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah dan antar daerah. Kemandirian daerah dalam penggunaan anggaran Pendapatan Asli Daerah akan menentukan bagaimana daerah tersebut dapat dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh dapat memenuhi belanja yang dilakukan oleh daerah tersebut. Pendapatan asli daerah merupakan indikator pembentuk kemandirian keuangan suatu daerah dalam pemenuhan pelaksanaan program dan aktivitas Pemerintahan Daerah dimana pendapatan asli daerah yang sudah dapat memenuhi kebutuhan daerah tersebut dapat dikatakan mandiri tanpa penggunaan dana transfer yang lebih besar. Dalam Undang-Undang No 32 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat

memberikan hak dan wewenang kepada setiap Pemerintahan Daerah sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya sendiri. Sumber penerimaan daerah terbesar diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih baik lagi mengelola dan memungut penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sehingga daerah tersebut dapat lebih mandiri dalam memenuhi setiap Belanja Daerah yang telah dianggarkan dan dapat mengurangi penggunaan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal *(fiscal gap)* suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah *(fiscal need)* dan potensi daerah *(fiscal capacity)*. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara kepada Provinsi Kota/Kabupaten tertentu dengan tujuan untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ini diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dengan Pemerintah Daerah dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam belanja daerahnya yang diberikan melaui mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus yaitu kriteria khusus, kriteria umum, dan kriteria teknis. Dana bagi hasil bersumber dari anggaran APBD yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentasi tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu.

Pada penelitian terdahulu oleh Bambang Prakosa meneliti pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Dareah terhadap prediksi belanja daerah di Povinsi Jawa Tengah dan DIY, menyatakan otonomi dilakukan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan perimbangan keuangan daerah. Dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal

antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah. Dalam penelitian Bambang Prakosa menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pelaksanaan belanja daerah dan penggunaan Dana Alokasi Umum yang lebih besar daripada Dana Aloksi Khusus akan menyebabkan terjadinya *Flypaper Effect.*

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari sebelas kabupaten dan empat kota. Setiap kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi sumber utama Pemerintah dalam melakukan pengembangan pembangunan daerah dan pengeloaan serta pengaturan keuangan daerah. Di Provinsi Sumatera Selatan secara umum Pendapatan Asli Daerah mengalami perkembangan setiap tahunnya .Pada tahun 2007, Pendapatan Asli Daerah 14 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan sebesar Rp 339,25 milyar dan angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika diamati perkembangan PAD kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2007-2008 terjadi peningkatan di semua Kabupaten dan Kota kecuali Kabupaten Musi Banyuasin, dan pada tahun 2008-2009 terjadi peningkatan PAD di seluruh kabupaten dan kota kecuali kabupaten Ogan Ilir, OKU Selatan dan Kabupaten Empat Lawang. PAD terbesar dihasilkan oleh Kota Palembang. Untuk mengukur kemandirian keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD, namun juga yang paling penting ditentukan oleh besarnya peran PAD dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Selain dana dari pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dari setiap Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera

Selatan mendapat Transfer dana dari Pemerintah Pusat yang berasal dari dana perimbangan yakni Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil pada APBN yang sudah ditentukan setiap tahun. Penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan akan mempengaruhi Belanja Daerah yang terdapat pada Kabupaten dan Kota yang terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan. Dilihat dari peningakatan Pendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan maka Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan sudah semakin mandiri dalam membiayai Belanja Daerahnya dan mengurangi dana transfer melalui Dana Perimbangan yang sumbernya dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul :

"PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KOTA DAN KABUPATEN PROVINSI SUMATERA SELATAN".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1) Bagaimana pengaruh antara kemandirian keuangan daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pada Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan?
2) Bagaimana potensi dari kemandirian daerah dalam memenuhi belanja daerah pada Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1) Untuk memberikan informasi tentang bagaimana pengaruh kemandirian daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pada Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan.
2) Untuk memberikan informasi tentang potensi dari kemandirian daerah dalam memenuhi belanja daerah pada Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Bagi Pemerintah

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2) Bagi akademisi

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan dan wawasan mengenai kemandirian daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah.
3) Bagi peneliti selanjutnya

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai revisi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada judul penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian serta menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait, menggambarkan kerangka pemikiran dan menarik hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan metodologi penelitian yang dipakai dan sampel data yang terperinci.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Memperlihatkan dan menjelaskan dari hasil-hasil penelitian yang telah diolah.

BAB V KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya, dan implikasi dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Halim. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah daerah Di Jawa dan Bali, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 16-17 Oktober 2003.

Argi, Ridho. Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009. Jurnal.

Aryanto, Rudi. 2011. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah Volume III No. 2.

Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislatif Rangkuman 7 Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan 15 Pemendagri. Jakarta: Penerbit Indeks.

Dwihandayani dan Elva, 2012. Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Volume 1 Nomor 1.

Imam Ghozali. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Listiorini, 2012. Fenomena *Flypaper Effect* Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Jurnal Keuangan dan Bisnis Vol. 4 No. 2.

Mangunkusumo, Skrikandi. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD) (Studi Pada Kota/Kabupaten Wilayah Pulai Jawa Periode 2009-2011). Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.

Nugraeni, 2011. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khsusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. AKMENIKA UPY Vol. 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tentang Dana Perimbangan.

Prakosa, Bambang, 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). JAAI VOLUME 8 NO. 2.

Syahputra, Indra, 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dana Alokasi UmumTerhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara".Tesis Universitas Sumatera Utara.

Taha dan Loganathan, 2008. *Causality Between Tax Revenue and Government spending in Malaysia. The International Journal of Business and Finance Research Volume 2 Number 2 2008.*

Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuagan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo.